

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

(LKPJ)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN

TAHUN 2018



PESISIR SELATAN

2019

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	120.643.258.453	44.597.575.074	36,97%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.732.134.700	2.665.829.233	97,57%
1	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140.200.000	117.359.431	83,71%
2	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	224.550.000	223.050.000	99,33%
3	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.193.000	50.193.000	100,00%
4	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.371.000	43.367.800	99,99%
6	6 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.983.000	99,94%
7	7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	30.500.000	30.500.000	100,00%
8	8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	13.745.000	98,88%
9	9 Penyediaan Makan Dan Minum	70.585.000	70.559.500	99,96%
10	10 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	209.150.000	208.941.590	99,90%
11	11 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	81.000.000	80.971.000	99,96%
12	12 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	64.090.000	56.284.000	87,82%
13	13 Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawah	238.700.000	223.638.012	93,69%
14	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	1.411.250.000	1.393.250.000	98,72%
15	15 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	66.280.000	65.640.500	99,04%
16	16 Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	0,00%
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	219.404.500	212.666.660	96,93%
17	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.000.000	34.988.200	99,97%
18	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.404.500	135.713.460	95,30%
19	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	42.000.000	41.965.000	99,92%
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	212.698.000	206.678.400	97,17%
20	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.416.000	67.817.400	97,70%
21	2 Pelatihan Penatausahaan Keuangan	143.282.000	138.861.000	96,91%
D	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	470.890.000	449.793.526	95,52%
22	1 Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak	180.000.000	163.098.526	90,61%
23	2 Pelatihan Verifikasi bantuan program PTK PAUD	200.000.000	199.205.000	99,60%
24	3 Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan	46.250.000	42.850.000	92,65%
25	4 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	44.640.000	44.640.000	100,00%

E	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	98.334.406.593	22.841.556.681	23,23%
26	1 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penyaga Sekolah	90.000.000	89.619.850	99,58%
27	2 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	75.000.000	74.289.000	99,05%
28	3 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018)	6.295.700.000	6.234.285.750	99,02%
29	4 Lomba Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	603.180.000	561.189.000	93,04%
30	5 Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil	209.175.000	202.831.877	96,97%
31	6 Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP	67.074.250	66.976.750	99,86%
32	7 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP	190.000.000	188.570.000	99,25%
33	8 Pengadaan Mobiler Sekolah SMP	850.000.000	844.848.990	99,39%
34	9 Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat	-	-	0,00%
35	10 Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	686.440.500	655.923.000	95,55%
36	11 Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)	1.750.000.000	1.736.674.500	99,24%
37	12 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2018)	538.545.000	538.545.000	100,00%
38	13 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2018)	6.338.000.000	6.269.240.800	98,92%
39	14 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2018)	158.000.000	158.000.000	100,00%
40	15 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2018)	20.100.000	19.500.000	97,01%
41	16 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)	46.933.892.679	-	0,00%
42	17 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20.670.348.064	-	0,00%
43	18 Pengadaan SPES SMP 1 Lengayang Kecamatan Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Propinsi Tahun 2018)	200.000.000	-	0,00%
44	19 Pengadaan Mobiler SMP dan SD se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Propinsi Tahun 2018)	1.000.000.000	6.365.850	0,64%

45	20	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi)	165.000.000	-	0,00%
46	21	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Carocok Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	165.000.000	-	0,00%
47	22	Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Duku Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	165.000.000	-	0,00%
48	23	Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 3 Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	165.000.000	-	0,00%
49	24	Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 2 Sufera Kec. Sufera (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	165.000.000	-	0,00%
50	25	Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 2 Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	165.000.000	-	0,00%
51	26	Pengadaan SPES SMP 1 Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	200.000.000	-	0,00%
52	27	Pengadaan SPES SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)	5.000.000.000	-	0,00%
53	28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	117.535.700	117.408.200	99,89%
54	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	100.000.000	-	0,00%
55	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	375.000.000	368.720.000	98,33%
56	31	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	180.000.000	177.263.000	98,48%
57	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	180.000.000	177.402.000	98,56%
58	33	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	219.090.500	207.085.000	94,52%
59	34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	297.154.000	278.056.000	93,57%
60	35	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	-	-	0,00%
61	36	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar	791.019.300	757.252.100	95,73%
62	37	Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar	80.000.000	62.325.000	77,91%
63	38	Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD	115.325.750	115.186.750	99,89%
64	39	Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar	372.867.850	369.867.000	99,20%
65	40	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar	110.856.000	59.097.250	53,41%
66	41	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	539.300.000	530.562.000	98,38%

67	42	Pengadaan Mobiler Sekolah SD	750.000.000	743.090.664	99,08%
68	43	Pembangunan Pagar SD	1.241.002.000	1.231.381.350	99,22%
F	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL		1.159.655.500	1.120.268.626	96,60%
69	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	49.900.000	40.690.000	81,54%
70	2	Pelatihan LKP dan PKBM	140.200.000	118.864.100	84,78%
71	3	Penyelenggaraan Paket C	462.400.000	462.212.500	99,96%
72	4	Pelatihan Pendidikan Keluarga	234.040.500	225.629.526	96,41%
73	5	Pelaksanaan UNPK Paket B	51.760.000	51.580.000	99,65%
74	6	Pelaksanaan UNPK Paket C	72.720.000	72.665.000	99,92%
75	7	Hari Aksara Internasional (HAI)	23.500.000	23.500.000	100,00%
76	8	Pelatihan Tutor Paket C dan B/A	125.135.000	125.127.500	99,99%
G	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		14.208.543.450	13.987.619.000	98,45%
77	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	112.050.000	100.848.600	90,00%
78	2	Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru (PPPG)	273.121.850	248.930.550	91,14%
79	3	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	196.797.500	186.375.500	94,70%
80	4	Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	60.175.000	43.815.000	72,81%
81	5	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	421.324.300	412.802.300	97,98%
82	6	Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik	168.926.000	168.926.000	100,00%
83	7	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	407.732.800	371.350.700	91,08%
84	8	Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru	121.100.000	116.713.900	96,38%
85	9	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	130.789.000	128.014.500	97,88%
86	10	Magang Tenaga Pendidik PAUD	208.225.000	191.650.000	92,04%
87	11	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD	393.804.500	387.354.950	98,36%
88	12	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP	71.815.000	58.120.000	80,93%
89	13	Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP	132.510.000	73.069.500	55,14%
90	14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS	11.510.172.500	11.499.647.500	99,91%
H	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		1.069.437.580	935.406.575	87,47%
91	1	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	61.809.000	49.768.000	80,52%
92	2	Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik)	75.112.000	65.237.000	86,85%
93	3	Penyelenggaraan Akademi Komunitas	548.556.380	497.894.770	90,76%
94	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	164.650.000	150.990.200	91,70%
95	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah	62.576.000	57.150.000	91,33%
96	6	Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	71.526.000	33.090.805	46,26%

97	7	Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan	85.208.200	81.275.800	95,38%
1		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.772.685.320	1.762.476.919	99,42%
98	1	Pagelaran Seni dan Budaya	313.536.800	312.122.800	99,55%
99	2	Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya	306.512.300	304.311.585	99,28%
100	3	Pengiriman Tim Kesenian	495.358.600	494.422.650	99,81%
101	4	Renovasi Medan nan Bapaneh	210.906.520	206.605.500	98,06%
102	5	Sumarak Pesisir Selatan dengan kegiatan	360.221.100	358.593.100	99,58%
103	6	Perawatan Cakar Budaya, Museum dan Peninggalan bawah air	86.150.000	86.121.284	99,97%
J		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	463.402.810	415.279.454	89,62%
104	1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	35.000.000	1.770.000	5,06%
105	2	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK	84.092.900	72.707.444	86,46%
106	3	Paket Seni Tradisional dan Moderen	310.000.000	306.492.100	98,87%
107	4	Pendokumentasian Simbol-Simbol Adat Pada Setiap Nagari Yang Ada di kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan Untuk Mempertahankan dan Melestarikan Simbol-Simbol Adat Pada Setiap Nagari	34.309.910	34.309.910	100,00%
		Jumlah Belanja	120.643.258.453		

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.732.134.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.665.829.233,- atau sebesar 94,70%. bertujuan untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan biaya jasa inventarisir dan pengelolaan Aset Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD /SKB dan SD/SMP/SMA/SMK se kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan khususnya Operator SIKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis kantor guna pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung.

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyediaan pembiayaan perjalanan Dinas Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan Dinas pegawai di dalam daerah, Biaya Operasional UPTD, SKB dan TK Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terpenuhinya kebutuhan akan layanan administrasi penganggaran dan keuangan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara tepat. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Terwujudnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 219.404.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.666.660,- atau sebesar 96,93% bertujuan untuk penyediaan Meubiler Sekolah sebanyak 25 Paket untuk 125 ruangan SD,SMP dan SMA/SMK se Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan belanja pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan BBM Operasional yang terdiri dari 3 mobil Dinas dan 13 motor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin alat-alat kantor, Pengadaan Alat Pendingin, Pengadaan alat penyimpanan Perlengkapan kantor, Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Pengadaan umbul-umbul/bendera

Manfaat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Meningkatnya tata kelola layanan administrasi perkantoran dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Capaian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Terwujudnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik.

Prestasi yang Diperoleh dari hasil Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Adanya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana-prasarana aparatur yang telah ada sarana-prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 212.698.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 206.678.400,- atau sebesar 97,17%. bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan Bimtek Kepala 150 orang kepala sekolah tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan bimtek untuk bendahara sekolah tentang pelaksanaan anggaran.

Manfaat Program ini yaitu Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur., sehingga dalam menjalankan tugas pokok berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik.

Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Yaitu Peningkatan kualitas layanan dan/atau pekerja administrasi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Alokasi dana sebesar

Rp. 470.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 449.793.526,- atau sebesar 95,52%

Program ini bertujuan untuk Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD sebanyak 3 angkatan, , pengadaan Lomba Kreatifitas TK dan PAUD, Jambore Anak Usia Dini, Jambore Pendidik PAUD dan Hari Anak Nasional,

Manfaat Program Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Terjadinya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD, dan peningkatan motivasi dan kepedulian masyarakat akan pendidikan dan perkembangan anak usia pendidikan dini mengikutkan anak untuk mengikuti program pendidikan , sehingga bertambahnya lembaga dan peserta didik.

Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Tingkat Propinsi Atau Nasiona Peran serta pelaksanaan Jambore FAUDNI tkt provinsi pada bidang lomba Penampilan Tari juara II dan Jambore PTK PAUDNI tkt provinsi bidang lomba Pelaksanaan Pembelajaran PAUD. memperoleh juara II.

Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program ini adalah APK Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Selatan diperingkat 2 Provinsi Sumatera Barat .

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dengan Alokasi dana sebesar Rp. 24.340.165.850 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.841.556.681 ,- atau sebesar 93,84%. Program ini merupakan program nasional berupa penyelenggaraan pendidikan sampai minimal sembilan tahun yang bertujuan untuk melaksanan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat pesisir selatan. Komponen dasar yang diselenggarakan berupa Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar, penyelenggaraan Pendidikan tingkat SD dan tingkat SMP, serta perbaikan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP. Kegiatan nya diantaranya berupa Pelaksanaan, Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar.

Bimbingan Teknis Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2018), Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2018), Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2018), Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2018), Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Penunjang 2018), Pendidikan Karakter SD dan SMP, Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Monitoring, Evaluasi dan laporan Dana BOS, Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Pengadaan Meubeluer Sekolah, Operasional Sarana Mobilitas Sekolah Di daerah Terpencil, Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD), Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pengadaan SPES SMP 1 Lengayang Kecamatan Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan Mobiler SMP dan SD se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi, Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP Negeri Carocok Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2018), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Carocok Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Duku Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Sistem Pembelajaran

Elektronik Sekolah SMP 3 Paiman Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 2 Sutera Kec. Sutera (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 2 Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan SPES SMP 1 Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan SPES SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018), Pengadaan Alat Drumband Sekolah, Pengadaan Komputer untuk UNBK Jenjang SMP, Pembangunan Pagar, Mobiler Sekolah SD, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Operasional sarana mobilitas sekolah di daerah terpencil Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Pertama, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pembiayaan perbaikan dan Operasional transportasi laut (motor boat) SMPN 6 Koto XI tarusan, biaya penilaian dan ujian akreditasi 25 sekolah SD se Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan Penunjang Biaya Operasional Sekolah Kecil untuk SD dan SMP, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD dan SMP, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SD dan SMP dengan sasaran 382 SD dan 74 SMP se Kabupaten Pesisir Selatan, menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berupa ujian UN, Pra UN dan UAS, menyelenggarakan pendidikan SMP berupa Ujian Akhir Sekolah Menengah Pertama (UAS SMP) dan try out, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD, menyelenggarakan lomba siswa jenjang SMP berupa lomba pidato dan debat bahasa Inggris bagi siswa SMP se kabupaten pesisir selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk

pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir Selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir Selatan Manfaat dan dampak dari Progrm Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah merupakan hasil dari pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2018 yang memberikan arti sangat signifikan dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, seiring dengan peningkatan daya saing secara global dalam mempersiapkan sumber daya manusia sedini mungkin. Pendidikan karakter begitu penting, dengan piloting pendidikan karakter pada SDN 21 Limau Sundai dan SMPN 1 Painan telah terjadi dampak yang dapat terlihat dalam keseharian dilingkungan sekolah pada aktifitas sopan santun, saling menghargai, bersosial kerjasama, disiplin belajar, beribadah, berakhlak, bersiap, mencintai tanah air dalam belah negara dan lainnya hal ini mengimbas dirumah serta dimasyarakat. Capaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu Terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik, dengan capaian seperti akreditasi sekolah SD telah terakreditasi 326 dari 384 ketercapaian 85%, SMP 90 % terakreditasi, sebanyak 67 sekolah dan SMA 100% terakreditasi dan SMK sebahagian program studi belum terakreditasi. Bintek Kurikulum 2013 ketercapaian pelatihan kurikulum 2013 guru SD baru telah mencapai 75% , Guru SMP tercapai 70% dan Guru SMA/SMK tercapai 65% dan penilaian Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan SD, SMP, tercapai 85% dan SMA dan SMK tercapai 90 % .

Adapun pretasi yang diperoleh dari hasil Program Lomba Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berada pada peringkat 12 dari 19 Kabupaten /Kota Sumatera Barat, sedangkan prestasi menyelenggarakan lomba SLB pada Bidang Non Akademik OZSN pada cabang kursi roda tahun 2017 baru peringkat 1 sumbar dan tingkat nasional pada posisi 10 besar.

6. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.159.655.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.120.268.626,- atau sebesar 96,60%. Program ini merupakan Pelaksanaan pendidikan di luar Sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang bertujuan untuk melayani dan memberikan pendidikan Non Formal dan informal kepada Masyarakat untuk meningkatkan Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah yang merupakan dua dari empat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun Kegiatan nya berupa menyelenggarakan Paket B setara SLTP dengan sasaran 6 kelompok PKBM yang terdiri dari 120 orang siswa, menyelenggarakan Paket C setara SMU dengan sasaran 6 kelompok belajar dengan peserta 120 orang, Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal mengadakan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional, dengan sasaran 30 orang tutor KF Di Kab.Pesisir Selatan, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional di kabupaten Pesisir Selatan guna penuntasan buta aksara latin. Sararan kegiatan ini sebanyak 1.200 orang buta aksara, biaya operasional pengiriman kontingen dan pembuatan Stand Pesisir Selatan pada kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional tingkat Sumatera Barat Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM, dan Pelaksanaan Kegiatan Menyekolahkan kembali Anak Putus Sekolah sebanyak 60 orang dari Jenjang SMP dan SMA/SMK. Adapun Prestasi Program ini berupa meningkatnya Angka melek huruf dari 97,41 % di tahun 2014 menjadi 98,12 % ditahun 2017.

7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 14.208.543.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.987.619.000 ,- atau sebesar 98,45%. Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi dan memberikan reward bagi tenaga pendidik (guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah). Keegiatannya berupa melakukan pendataan dan verifikasi sertifikasi pendidik, pelatihan calon kepala Sekolah, mewadahi MGMP SMP dan SMA se kabupaten Pesisir Selatan, penilai kinerja kepala Sekolah dan manajemen oleh pengawas sekolah se kabupaten Pesisir Selatan, memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah) berpretasi, tingkat Kabupaten Pesisir selatan, Pengelolaan Pendataan dan Pemet serta aan Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui SIM NUPTK, data NUPTK ini menjadi data awal untuk sertifikasi guru, kegiatan penilaian angka kredit guru guna kenaikan pangkat guru untuk periode April dan oktober,

Program ini bermanfaat untuk Terjadinya Penguatan terhadap kompetensi pengawas SD, dan SMP/SM yang akan memberikan layanan pembinaan terhadap sekolah binaan baik akademik atau manajerial terhadap guru dan kepala sekolah. Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru ini bermanfaat bagi seluruh guru sebagai media bertatap muka guru mata pelajaran sejenis dan/atau guru kelas secara terjadwal, untuk mendiskusikan permasalahan dan informasi terkini pelaksanaan tugas pokok.

Adapun prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik rekrutmen calon pengawas atau calon kepala sekolah, serta pelatihan guru mata pelajaran matematika dan bintek pengawas SD, SMP/SM memberikan kontribusi terhadap hasil lulusan peserta didik contoh tahun 2018 hasil UN SMA peringkat 1 sumbar dan hasil UN SMP peringkat 6 Sumatera Barat dari 19 Kabupaten /Kota. Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, 31 (tiga puluh satu) orang guru telah mendapatkan Nomer Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan 365 orang telah dinyatakan layak seleksi akademik yang akan mengikuti dikalut calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga tingkat nasional.

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.069.437.580,- dan terealisasi sebesar Rp 935.406.575,- atau sebesar 87,47%. Program ini bertujuan untuk menciptakan manajemen Layanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan Pendidikan Sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2018. Adapun kegiatannya berupa Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan dengan adanya website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pelaksanaan Sosialisasi pengumpulan Data Pokok Pendidikan terhadap 515 orang Operator Pendataan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan UPTD se Kabupaten Pesisir Selatan, Seleksi

calon Mahasiswa AK, Pelatihan calon FTK Akademi, pengadaan sarana pendukung belajar dan pemberian bantuan transportasi dosen dan 120 mahasiswa Akademi Komunitas.

Manfaat Program ini diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Operasional dan pelayanan dapodik dengan sistem TIK, tersedianya informasi program melalui web disdik pessel, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Sosialisasi dan Updating Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyelenggaraan Akademi Komunitas.

Capaian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dapat terlaksana secara baik serta bersinergi dengan tingkat provinsi dan nasional. Ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan target yang direncanakan.

11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program pengelolaan kekayaan budaya berisikan kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum bawah air, kegiatan perawatan cagar budaya museum dan peninggalan bawah air, kegiatan pengiriman tim kesenian ke propinsi dan luar propinsi, Fasilitasi dan kegiatan pendamping festival seni dan Budaya, kegiatan Renovasi medan nan Bapaneh, kegiatan sumarak pesisir selatan dalam rangka memeriahkan hari jadi pesisir selatan setiap tanggal 15 april, Pergelaran seni dan budaya, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, Penyusunan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal, kegiatan penampilan paket seni tradisional dan modern dan Pendokumentasian Simbol-simbol adat pada setiap nagari yang ada di kabupaten pesisir selatan merupakan kegiatan untuk mempertahankan dan melestarikan simbol-simbol adat pada setiap nagari.

C. PERMASALAH DAN SOLUSI

Permasalahan yang di hadapi pada Program Wajib pendidikan dasar sembilan tahun Kegiatan Bantuan Oprasional Sekolah Tingkat Pendidikan sekolah Dasar (SD) dan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tahun 2018 ini belum bisa dilaporkan melalui aplikasi SIPKD karena proses pencairannya dilaksanakan di sekolah masing-masing.

Solusinya sedang di upayakan Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke masing-masing kecamatan, serta menyiapkan aplikasi E-Bos yang terintegrasi ke SIPKD.

Painan, Januari 2019

Kepala Dinas A-



F.H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 195912311985121005